

ISSN 2085-5192

Volume 7 No. 1, Maret 2015

JURNAL MANAJEMEN PEMERINTAHAN

TRANSFORMASI

PEMERINTAHAN

Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan *Responsiveness*
terhadap Budaya Akademik di Perguruan Tinggi
H. Ali Hanafiah Muhi

Kepuasan Masyarakat atas Pelaksanaan Pelayanan Terpadu
di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
H. Basuki Rachmat

Hakikat Pemerintahan dan Proyeksi Pengembangannya
Susanti

Studi Kemungkinan Penguatan Fungsi Kecamatan
sebagai Pelindung Masyarakat Melalui Pelimpahan Urusan Pemerintahan Umum
di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten
Adfin R. Bidhowah

Pengaruh Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja PNS
di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
Marthalina

Peranan Pengawas Internal Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan
Pemerintahan yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel
Edy Sudaryanto

Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Aspek Negara Kesejahteraan
(*Welfare State*)
Dewi Safitri

Membangun Produktivitas Organisasi
Melalui Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Roosje Kalangi

Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum
terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi
H. Yana Sahyana



FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

ISSN 2085-5192

Volume 7 No. 1, Maret 2015

JURNAL MANAJEMEN PEMERINTAHAN

TRANSFORMASI P E M E R I N T A H A N

Jurnal Transformasi Pemerintahan adalah wadah informasi
bidang Manajemen Pemerintahan
berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah.
Pertama kali terbit pada 2009 dengan frekuensi terbit tengah tahunan
(Maret dan Oktober).

SUSUNAN PENGURUS JURNAL TRANSFORMASI PEMERINTAHAN

Pembina

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Penasehat

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS
Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si

Penanggung Jawab

Drs. Sampara Lukman, MA

Pemimpin Redaksi

Drs. Bambang Trisantono, M.Si

Sekretaris

Dr. H. Ali Hanafiah Muhi, MP
Dra. Gatningsih, MT
Dr. Hj. Faria Ruhana, MP

Mitra Bestari/Narasumber

Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si (IPDN)
Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd (IPDN)
Dr. Ika Sartika, MT (IPDN)
Dra. Mudiyantri Rahmatunnisa, MA, Ph.D (Unpad)
Dr. Dyah Mutiarin (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)

Tim Redaksi

Drs. Zulkarnaen Ilyas, MM
Drs. H. M. Cholid, M.Ag
Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si
Dr. Udaya Madjid, M.Pd
Dra. Sustiaty, M.Si
Dra. Hj. Susilawati, M.Pd
Mgs. Ismail, S.Pd
Ismi Dini Saefa, S.Pd
Mutiar Fitri Dewi, S.Pd

Staf Redaksi

Agus Toyib, S.Sos, M.Si
Dedi Kusmana, S.Sos
Ipong Ramnasih, S.Sos
Paramitha Novia Hastuti
Annisa Citra Fatikha, S.STP

Staf Distribusi

H. Busiri, S.PdI, M.Si
Udin, SE
Nanang Saripudin
Teresa Irminda Nangameka, S.STP
M. Sodik, S.Sos

Bendahara

Ismail, S.PdI
Sugimah
Nendah Diani K, S.Sos

Alamat Redaksi/Penerbit

Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP)
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Raya Jatinangor Km. 20
Telp. (022) 7798252 - 7798253 Fax. (022) 7798256
Jatinangor - Sumedang 45363

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridha-Nya *Jurnal Transformasi Pemerintahan* kembali dapat menjumpai para pembaca, di mana kami berusaha untuk selalu memberikan informasi ilmiah secara berkesinambungan, baik hasil pemikiran (studi kepustakaan) maupun hasil penelitian di lapangan. Pada Volume 7 No. 1, Maret 2015 ini tersaji sembilan karya tulis ilmiah, terdiri dari enam hasil studi kepustakaan dan tiga hasil penelitian di lapangan (studi kasus).

Karya tulis ilmiah hasil studi kepustakaan yang pertama tentang pengaruh nilai transparansi, akuntabilitas, dan *responsiveness* terhadap budaya akademik di perguruan tinggi. Kedua, tentang hakikat pemerintahan dan proyeksi pengembangannya. Selanjutnya yang ketiga, peranan pengawas internal pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan akuntabel.

Artikel keempat, tentang Negara Hukum Indonesia ditinjau dari aspek negara kesejahteraan (*welfare state*). Kelima, membangun produktivitas organisasi melalui perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Artikel keenam, tentang telaah kritis politik penegakan hukum terhadap penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi.

Tiga karya tulis hasil penelitian di lapangan keseluruhannya dari Provinsi Jawa Barat, yakni tentang kepuasan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan terpadu. Lalu, studi kemungkinan penguatan fungsi kecamatan sebagai pelindung masyarakat melalui pelimpahan urusan pemerintahan umum, dan terakhir, pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja PNS.

Sebagaimana misinya, *Jurnal Transformasi Pemerintahan* diharapkan dapat secara kontinyu memberikan kontribusi akademik melalui penyampaian informasi ilmiah yang dapat menambah wawasan dan mozaik kajian Ilmu Pemerintahan, terlebih apabila mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152/E/T/2012 Tanggal 27 Januari 2012 yang menekankan tentang persyaratan kelulusan bagi mahasiswa untuk strata satu dengan ketentuan menghasilkan makalah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah, strata dua pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi Dikti, dan strata tiga pada jurnal internasional. Jurnal ilmiah adalah terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah yang spesifik dan dalam bidang tertentu.

Terbitnya jurnal ini kami yakini dapat memberikan nilai tambah kepada pembaca dan para penulisnya, juga membawa harapan untuk menumbuhkembangkan khasanah Ilmu Pemerintahan. Tak lupa, kami pun menunggu kritik dan saran pembaca untuk perbaikan dalam penerbitan volume/ nomor selanjutnya.

Redaksi,

TRANSFORMASI

PEMERINTAHAN

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsiveness terhadap Budaya Akademik di Perguruan Tinggi	
H. Ali Hanafiah Muhi	1-13
Kepuasan Masyarakat atas Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat	
H. Basuki Rachmat	15-34
Hakikat Pemerintahan dan Proyeksi Pengembangannya	
Susanti	35-46
Studi Kemungkinan Penguatan Fungsi Kecamatan sebagai Pelindung Masyarakat Melalui Pelimpahan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten	
Adfin R. Bidhowah	47-62
Pengaruh Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja PNS di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	
Marthalina	63-78
Peranan Pengawas Internal Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel	
Edy Sudaryanto	79-88
Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Aspek Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	
Dewi Safitri	89-98
Membangun Produktivitas Organisasi Melalui Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Roosje Kalangi	99-108
Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi	
H. Yana Sahyana	109-122

HAKIKAT PEMERINTAHAN DAN PROYEKSI PENGEMBANGANNYA

Oleh: Susanti

ABSTRACT

An indicator of the existence of government is the presence of the arrangement and law enforcement. Moral degradation, manipulation of law, and corruption by public officials make us contemplate back: what is exactly the government's essence and how is the projection of its development. The answer to these questions are revealed through philosophical reconstruction by giving an emphasis on scientific ontology. Through the construction it can be found that the government's essence is an activity in regulating/managing/steering, serving and empowering all the elements of government (government-entrepreneur-society) by utilizing the optimal of cybernetics to achieve happiness and well-being. The using of cybernetics for the activity of government through the use of ICT creates the electronic government (e-Gov), encourages the rising of open government, and creates the new democracy model of cyberdemocracy.

Keywords: *substance government, cybernetics, e-gov, open government,*

ABSTRAK

Indikator eksistensi pemerintahan adalah adanya pengaturan dan penegakan hukum. Degradasi moral, manipulasi hukum, korupsi oleh pejabat publik membuat kita merenungkan kembali: apa sebenarnya hakikat pemerintahan dan bagaimana proyeksi pengembangannya. Jawaban pertanyaan ini diungkap melalui rekonstruksi filosofis dengan memberikan penekanan pada ontologi keilmuan. Melalui konstruksi tersebut dapat ditemukan bahwa hakikat pemerintahan adalah aktivitas dalam mengatur/mengelola/mengarahkan, melayani dan memberdayakan semua elemen negara (pemerintah-pengusaha-masyarakat) dengan memanfaatkan sebesar-besarnya cybernetics untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Penggunaan cybernetics untuk aktivitas pemerintahan melalui ICT melahirkan electronic government (e-Gov), mendorong lahirnya pemerintahan terbuka (open government), dan menciptakan model demokrasi baru cyberdemocracy.

Kata kunci: hakikat pemerintahan, cybernetics, e-gov, pemerintahan terbuka

PENDAHULUAN

Lemahnya penegakan hukum, degradasi moral, korupsi yang dilakukan pejabat publik, dll.

membuat kita merenung kembali dan teringat pada Lord Acton bahwa *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*). Apa

kelompok (Samawan, 1999: 16).⁷ Akibatnya *steering* dilakukan tanpa landasan etika dan moral, sehingga kepentingan publik bukan menjadi prioritas lagi.

Presiden selaku kapten kapal seharusnya dapat mengelola kapal secara efektif. John Pierre & B. Guy Peters (2000: 37-38) secara implisit mengemukakan beberapa persyaratan pemerintahan yang efektif, yaitu: (1) adanya kekuasaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebab tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak dapat mengarahkan rakyatnya; (2) adanya kewenangan atau otoritas, sebab dalam kewenangan melekat hak untuk melakukan tindakan; dan (3) adanya kemampuan untuk memengaruhi secara paksa/sukarela.⁸ Kekuasaan dalam praktiknya sering dilihat sebagai bentuk hubungan yang mempraktikkan kontrol seseorang/kelompok terhadap orang lain/kelompok lain. Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah bentuk kontrol yang terkadang berbeda dalam implementasinya sehingga melahirkan pengaruh. Heywood (1999: 131) mengemukakan perbedaannya adalah kalau kekuasaan dianggap sebagai kapasitas dalam membuat keputusan formal yang mengikat semua orang, sedangkan pengaruh adalah kemampuan memengaruhi isi atau komponen dari keputusan formal melalui berbagai penekanan eksternal.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa keputusan formal yang mengikat tersebut tidak dibuat dalam keadaan *vakum* (tanpa respons dan masukan dari luar). Pengaruh di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: loby politik, pendekatan rasional, sampai dengan mengadakan intimasi terbuka. Misalnya model koalisi antarpol pada pilpres 2014 menunjukkan bagaimana cara loby, transaksi politik, dsb. digunakan untuk meyakinkan parpol lain, bagaimana kampanye pilpres dilakukan untuk meloby rakyat melalui deklarasi dukungan, kampanye hitam/negatif, dll. Parpol yang seharusnya melakukan fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik

yang baik untuk dapat melahirkan pejabat publik yang kapabel dipertanyakan.

Pada kekuasaan legal melekat kewenangan untuk menjalankan amanat atau mandat rakyat. Kewenangan ini dipatuhi karena sumber perintah adalah kekuasaan legal, sehingga dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki maka pemerintah dapat memengaruhi rakyat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama yaitu masyarakat adil dan makmur. Pengaruh adalah kemampuan untuk membujuk atau mempersuasi orang lain agar mau melaksanakan perintah atau meyakinkan orang lain untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan bersama. Efektivitas pemerintahan akan berjalan efektif tergantung pada kemampuan untuk memengaruhi orang/ lembaga. Dengan demikian antara kekuasaan, kewenangan, dan pengaruh merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan.

Terkait dengan pengaruh, ada berbagai bentuk tindakan untuk memengaruhi antara lain sbb. *Pertama*, memengaruhi melalui intelek (rasio) yaitu dengan cara meyakinkan orang agar melakukan tindakan tertentu secara instrinsik adalah baik. Misalnya melalui penggunaan data yang valid dan akurat untuk meyakinkan masyarakat. Umumnya kelas menengah ke atas lebih mudah dipengaruhi melalui data atau menggunakan alasan-alasan yang masuk akal. Dalam praktiknya seringkali lembaga pemerintah mengeluarkan data yang dianggap sebagian masyarakat kurang valid/ akurat atau justru menyembunyikan sebagian data yang seharusnya diketahui masyarakat. *Kedua*, memengaruhi melalui emosi artinya membujuk orang untuk melakukan suatu tindakan dengan memainkan emosi. Sejauh pengaruh untuk memainkan emosi itu positif dan tidak berlawanan dengan aturan hukum, maka masyarakat perlu merespons positif; sebaliknya jika pengaruh emosi ini sudah merusak fasilitas publik dan melawan hukum maka patut dikritisi. *Ketiga*, memengaruhi melalui kepentingan pribadi artinya membujuk orang untuk mendukung karena memberi manfaat bagi kita. *Iming-iming* hadiah dari calon pejabat politik bila ybs. menang dalam proses politik menunjukkan masih rapuhnya etika demokrasi di Indonesia. Bentuk pengaruh ini menurut penulis kurang etis, karena merusak sistem dan tatanan aturan yang dibangun.

7 Samawan, I. 1999. *Money Politics, Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal. 16.

8 Pierre, J & Peters, B. Guy. op.cit. Hal. 37-38.

9 Heywood, Andrew. 1999. *Political Theory, An Introduction*. New York: Palgrave. Hal. 131.

Keempat, memengaruhi melalui solidaritas grup artinya membujuk orang untuk bekerja atas nama kelompok. Sejauh tujuan itu positif, meningkatkan produktivitas rakyat, dan sejalan dengan tujuan pemerintah; maka solidaritas grup tersebut perlu diberdayakan misalnya: kegiatan pengajian, posyandu, PKK, paguyuban pengolah limbah, dll. *Kelima*, memengaruhi dengan paksaan (*coersion*). Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memengaruhi rakyat dengan paksa dalam menegakkan peraturan. Efektivitas memengaruhi dengan paksaan ini seringkali dilakukan dengan pemberian sanksi hukum untuk memberikan efek jera. Bahkan beberapa kasus seringkali diwarnai dengan paksaan fisik misalnya dalam penertiban PKL yang sebenarnya sudah bukan jamannya lagi. Paksaan fisik hanya melahirkan ketaatan sesaat, dan cenderung mengurangi kewibawaan pemerintah; oleh karena itu sebaiknya digunakan cara-cara persuasif. Cara persuasif memberikan efek lebih baik dalam menumbuhkan kepatuhan rakyat, dan meningkatkan kewibawaan pemerintah.

Berbagai kemungkinan dapat digunakan dalam pengaruh, antara lain sbb. *Pertama*, intelek/kecerdasan, pengetahuan dan riset dapat digunakan untuk berargumen yang meyakinkan. Melalui hasil riset atau penelitian yang didukung oleh data yang akurat dapat dibangun argumen yang jelas dan rasional, sehingga hasil riset dapat memberikan pengaruh. Hasil riset di Indonesia sering tidak diindahkan pemerintah sebagai acuan untuk mengambil kebijakan karena dianggap terlalu ideal/utopis. Pemerintah lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang praktis atau atas kemauan politik tertentu. Misalnya: Kasus pemekaran wilayah seringkali tidak dibangun dari argumen hasil penelitian, tetapi kemauan politik elit yang didukung oleh elit di DPR. *Kedua*, mereka yang mempunyai uang dan keahlian dapat menghasilkan iklan yang efektif. Iklan di media terutama televisi merupakan media efektif untuk memengaruhi seseorang sebab daya jangkau dan efek iklan melalui televisi sangat luas. *Ketiga*, mereka yang mengontrol kemakmuran dapat menawarkan hadiah uang (suap). Pejabat politik yang mempunyai kapital besar dapat dengan mudah menggunakan uangnya untuk menggerakkan orang melakukan keinginannya. Misalnya: membayar masyarakat untuk melakukan

demonstrasi, memberikan gratifikasi agar pemerintah melepaskan hak atas tanah konsensi hutan lindung, dsb. Pengaruh ini tidak mendidik masyarakat, kurang etis, dan merusak sistem/aturan yang sudah ada sebab sama artinya mendidik rakyat untuk melawan sistem/aturan yang ada. *Keempat*, mereka yang mempunyai hubungan organisasional dapat menawarkan prospek karir (*job*, kontrak, patronase). Bila seseorang menduduki jabatan dalam struktur organisasi yang mempunyai hubungan organisasional, maka orang tersebut mempunyai kekuasaan besar untuk mempromosikan atau menawarkan orang lain pada posisi tertentu. Oleh karena itu tidak heran di Indonesia jabatan struktural menjadi incaran bagi banyak orang karena dapat memberikan tawaran-tawaran pada orang untuk menduduki jabatan tertentu. Hubungan organisasional ini dapat juga membangun hubungan yang asimetris yaitu orang yang mempunyai kekuasaan yang besar dan orang yang tidak mempunyai kekuasaan, sehingga lahirlah hubungan *patron-clien* dalam dunia politik. *Kelima*, mereka yang mengontrol aparat pemerintah dapat menawarkan *policy outputs* (menjanjikan kebijakan yang menguntungkan para pendukungnya). Pemerintah mempunyai kekuasaan, kewenangan dan pengaruh untuk mengeluarkan *policy* yang dapat memberikan keuntungan tertentu pada pendukungnya sebagai hadiah atas keuntungan atau kesetiaan yang telah diberikan. Idealnya hal seperti ini tidak boleh terjadi karena tidak etis dan menjual mandat rakyat, sebab kebijakan yang dikeluarkan akan mengikat publik.

Pada kekuasaan yang sah, maka di dalamnya melekat sebuah kewenangan atau otoritas. Otoritas adalah bentuk kekuasaan yang memungkinkan seseorang mematuhi perintah bukan karena rasional atau emosional atau rasa takut, tetapi menghormati sumber perintah. Otoritas itu melekat pada pejabat pemerintah yang didapatnya dari kekuasaan yang sah, sehingga dasar hukumnya jelas dan tidak bisa disanggah. Oleh karena itu menjadi keharusan rakyat untuk mematuhi perintah pejabat. Setiap pemerintahan memperoleh otoritas sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Bila seseorang mempunyai jabatan, maka secara otomatis otoritas melekat kepadanya. Otoritas ini tidak dapat dielakkan (harus) agar dapat digunakan pejabat untuk

mencapai tujuan. Oleh karena itu hampir semua orang dan sepanjang waktu, orang beraktivitas di bawah otoritas pemerintah. Artinya, setiap saat orang berada di bawah otoritas pemerintah, dan hal tersebut tidak dapat dielakkan. Namun tidak semua orang patuh terhadap perintah/otoritas sehingga perlu pemaksaan (*coersion*). Oleh karena itu adanya sanksi hukum bagi pelanggar perintah/otoritas, merupakan upaya paksaan yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan hukum. Di Indonesia, otoritas itu seringkali disalahgunakan oleh pejabat publik. Dualisme peran (pejabat publik dan ketua umum partai politik) seringkali menjadi sumber penyalahgunaan otoritas. Manakala pejabat publik mengangkat tim suksesnya untuk menduduki jabatan strategis karena balas jasa, maka yang terjadi selanjutnya adalah penyalahgunaan wewenang dan yang paling mengerikan dampaknya adalah menggunakan *policy outputs* untuk memberikan keuntungan bagi pendukungnya tanpa memikirkan dampaknya bagi kepentingan publik. Mengapa penulis katakan mengerikan, karena membangun sistem monopoli melalui kebijakan. Contoh: kebijakan import daging sapi justru berakibat mahalnya harga daging sapi sampai sekarang karena disinyalir justru melahirkan politik kartel. Presiden yang merangkap sebagai dewan pembina salah satu parpol mengajukan cuti untuk melakukan kampanye pileg. Secara yuridis, undang-undang memperbolehkan namun secara etika tidak pantas. Undang-undang memperbolehkan karena produk hukum tersebut dibuat oleh legislatif yang *notabene* mempunyai kepentingan yang sama. Secara etika, idealnya begitu seorang menduduki jabatan publik maka semua *ornamen* partai harus ditanggalkan dan harus fokus untuk melayani kepentingan publik.

Pemerintahan dan masyarakat merupakan dua sisi dalam mata uang yang sulit dipisahkan, pemerintahan lahir karena ada masyarakat. Pada awalnya tujuan manusia bermasyarakat adalah supaya bisa bertahan hidup (*survive*), sebab manusia yang hidup sendirian membuat dirinya bersaing terus menerus dengan manusia lainnya. Kataupun *survive*, manusia harus senantiasa berkonflik dengan manusia lainnya sehingga melahirkan rasa tidak nyaman yang mengancam eksistensi manusia. Kekhawatiran inilah yang kemudian menggerakkan manusia

mengadakan ikatan bersama berupa kontrak sosial. Kontrak sosial sebagaimana diungkapkan Jean Jacques Rousseau dalam Suhelmi (1999: 194–195) memaparkan bagaimana pemerintahan muncul.¹⁰ Manusia berdasarkan kesadaran penuh berusaha keluar dari keadaan alamiah dan membentuk negara, dengan tujuan agar dengan adanya kekuasaan negara (pemerintah) itu mereka bisa merasa lebih terjamin hidupnya, terhindar dari anarkhi yang muncul dari kebebasan total. Meskipun negara telah terbentuk, tidak berarti kebebasan dan kebaikan-kebaikan tertentu dalam keadaan alamiah menjadi lenyap; individu-individu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya karena mereka tetap dalam keadaan sediakala. Negara (pemerintahan) merupakan produk perjanjian sosial, di mana individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama (*common power*) pada seseorang/sekelompok orang. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara, atau istilah lain yang identik dengannya. Negara berdaulat karena mandat dari rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga keamanan maupun harta benda mereka. Kedaulatan negara akan tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan rakyat. Bila negara menyimpang dari kehendak rakyat, maka keabsahan kedaulatan negara akan mengalami krisis.

Pada dasarnya masyarakat menunjukkan adanya suatu matriks umum dari aktivitas yang dibentuk oleh kesamaan perilaku dan frekuensi interaksi secara intens. Tidak mustahil masyarakat yang bergabung di daerah tertentu dan membentuk kelompok serta membangun aturan-aturan hidup bersama cenderung mempunyai perilaku yang mirip karena adanya interaksi intensif, sehingga dalam masyarakat itu terbentuklah kebudayaan. Masyarakat adalah wadah lahirnya suatu kebudayaan, sedangkan pemerintahan merupakan spesialisasi aktivitas dari individu-individu dan institusi yang membuat keputusan publik yang berlaku untuk seluruh komunitas.

¹⁰ Suhelmi, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Darul Falah. Hal. 194-195.

Dengan demikian ada aktivitas masyarakat dan aktivitas pemerintahan, di mana pada aktivitas pemerintahan terdapat berbagai spesialisasi. Aktivitas masyarakat adalah keterampilan masyarakat di mana di dalamnya tergabung bidang ilmu yang heterogen. Aktivitas pemerintahan haruslah didukung oleh orang-orang yang harus mempunyai ilmu dan keterampilan secara spesifik, sehingga aktivitas pemerintahan ada pembagian bidang tugas. Oleh karena itu orang-orang yang duduk di pemerintahan haruslah mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan yang khusus, sehingga tidak dapat diisi sembarang orang. Selain itu ada institusi yang membuat keputusan publik yang berlaku untuk seluruh komunitas. Pemerintahan yang efektif, minimal harus melaksanakan fungsi sbb. *Pertama*, melindungi masyarakat dari serangan luar. Asal muasal lahirnya pemerintahan pada masyarakat suku adalah untuk melindungi masyarakat dari serangan luar agar tetap *survive* dengan cara menghimpun kekuatan agar bisa menangkal serangan luar. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintahan sekarang adalah menjaga dan melindungi masyarakat dari serangan luar. *Kedua*, menegakkan hukum dan perilaku sosial. Hukum harus ditegakkan supaya masyarakat dapat hidup tertib dan perilaku sosial diarahkan sesuai norma yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin rasa kepastian hukum pada masyarakat. *Ketiga*, mendamaikan konflik antar anggota masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah untuk mencari solusi agar masyarakat dapat berdamai dan dapat kembali hidup tenang, serta mengarahkan perilaku sosial dengan cara menegakkan hukum. *Keempat*, memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat baik pelayanan fisik langsung (melayani KTP, akte kelahiran, perzinan, dsb) ataupun tidak langsung (membuat kebijakan, keputusan, program, dsb) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unsur melayani kepentingan publik dalam hal ini dapat ditambahkan menjadi hakikat pemerintahan.

Pemerintahan moderen sekarang ini lahir melalui proses yang panjang dari pemerintahan primitif. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemerintahan primitif ada sebagai sarana ketahanan kelompok. Ingat pada masyarakat suku, pemerintahan

ada sebagai sarana ketahanan agar *survive* sehingga mereka berhimpun dan membentuk pemerintahan serta ada yang ditunjuk untuk memerintah, menegakkan aturan, dan mengatur kehidupan kelompok. Hal ini diperlukan supaya kelompok masyarakat dapat hidup tertib dan normal, sehingga perilaku sosialnya perlu diarahkan. Dalam upaya pengaturan tersebut, pemerintahan perlu membuat keputusan bersama yang diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pemerintahan diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan memelihara perdamaian, serta memelihara/melindungi wilayah sumber mata pencaharian. Pada masyarakat primitif, berburu merupakan mata pencaharian masyarakat sehingga menjadi tugas pemerintahan untuk melindungi wilayah perburuan agar tidak diintervensi atau diambil alih oleh kelompok lain. Seiring dengan perkembangan cara hidup masyarakat, maka menghadapi pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tahun 2015 menjadi tugas pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih luas, dan menjadikan masyarakat agar lebih impersonal (tidak terlalu subyektif). Menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kerja sama yang lebih luas, dan bila terjadi konflik dalam masyarakat maka pemerintah mencari solusi untuk meningkatkan kerja sama. Kerja sama yang lebih luas ini akan membuka wawasan masyarakat untuk bersikap objektif dan impersonal, sehingga dalam konteks negara diharapkan lebih objektif dalam bertindak serta menekankan aspek kolega yang lebih luas. Memang hidup manusia tidak lepas dari kelompok primordial (suku, marga, agama) namun melalui pergaulan yang luas masyarakat mulai mengembangkan diri menjadi individu yang mewarnai kelompok dalam skala yang lebih luas. J.W. Schoolf (1982) menyebutnya bahwa manusia selalu mengalami pembesaran skala, sehingga manusia mengidentifikasi diri bukan sebagai kelompok asli tetapi mewarnai kelompok pada skala lebih luas dan diharapkan menjadi impersonal.¹¹

11 Schoolf, J.W. (Terj. RG. Soekadjo). 1982. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.

Aktivitas pemerintahan dapat berjalan baik, bila diikuti penegakan aturan artinya aktivitas pemerintahan haruslah menempatkan hukum di atas segalanya. Hal ini penting karena beberapa alasan sbb. Penegakan aturan merupakan masalah yang kompleks, karena setiap manusia mempunyai kecerdasan. Pemerintah memperoleh mandat dari masyarakat agar masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menegakkan aturan agar tatanan sosial terjadi. Oleh karena itu penegakan aturan merupakan masalah yang kompleks. Manusia perlu dipaksakan untuk menegakkan aturan, karena manusia mempunyai kecerdasan yang bisa memanipulasi aturan hukum. Perlu penegakan aturan terus menerus, agar orang tidak melanggar hukum. Manusia dengan kecerdasannya dapat mengikuti aturan hukum atau dapat juga menentang hukum. Mereka yang mengikuti aturan karena sadar bahwa aturan perlu diikuti untuk ketenteraman bersama, sedangkan mereka yang menentang hukum cenderung memanipulasi hukum dengan memanfaatkan celah kelemahan/kekurangan hukum itu sendiri. Itu sebabnya manusia dapat memahami, sebaliknya dapat juga memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi/kelompok. Manipulasi hukum akan menimbulkan pelanggaran moral, pelanggaran hukum, korupsi, dsb. untuk kepentingan pribadi/kelompok. Oleh karena itu diperlukan kerja sama untuk menegakkan aturan dalam perilaku sehari-hari sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi pemerintah.

Berdasarkan tipologi pemerintahan Plato dan Aristoteles, yang terbaik untuk suatu negara sangat ditentukan oleh kondisi dan pilihan masyarakat namun apapun pilihan tipe pemerintahan maka penegakan hukum wajib ditegakkan secara benar/baik demi kepentingan umum. Bagaimana dengan kondisi

Indonesia? Secara konstitusional, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia dengan 15 parpol dan keanggotaan legislatif sebesar 560 orang, namun praktiknya pemerintahan diatur oleh beberapa elit dengan penegakan hukum lemah. Oleh karena itu, ciri oligarki di Indonesia lebih dominan dibanding demokrasi. Aristoteles sendiri sebenarnya tidak cocok dengan demokrasi karena demokrasi cenderung menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan, sedangkan yang baik adalah demokrasi konstitusional. Menurutnya adanya penegakan hukum yang ketat maka ada jaminan bagi demokrasi berjalan baik, sebaliknya bila penegakan hukum lemah maka demokrasi sesuai norma yang berlaku tidak dapat ditegakkan dan eksistensi pemerintahan menjadi dipertanyakan.

Plato dan Aristoteles melihat bahwa penegakan aturan ini terkait dengan tipe pemerintahan sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. *Platonic/Aristotelian Typology of Government*

		HOW IS RULE CONDUCTED?	
		LAWFUL (in the c o m m o n good)	LAWLESS (in private interest)
WHO RULES?	ONE	MONARCHY	TYRANNY
	FEW	ARISTOCRACY	OLIGARCHY
	MANY	POLITEA	DEMOCRACY

Sumber: Diadaptasi dari Suhelmi (1999: 36-37).

Pemerintahan moderen terbentuk melalui proses yang panjang. Bermula dari pemerintahan primitif dalam masyarakat kesukuan, tugas pemerintahan awalnya terkait dengan pengorganisasian kegiatan perburuan. Pemerintahan primitif ini sangat sederhana yang utama tujuannya agar warganya mendapat kecukupan pangan, wilayah perburuannya tidak diintervensi kelompok lain, dan aman dari serangan luar. Untuk mengorganisir kegiatan perburuan ini diperlukan pemimpin dari kelompok tersebut untuk mengefektifkan tugas-tugas kelompok. Pemerintahan primitif adalah proses, di mana seperangkat aktivitas terus bertambah sepanjang waktu. Struktur

Perubahan sosial atau budaya merupakan dampak modernisasi, dan Schoorl melihatnya sebagai proses transformasi dalam semua aspek. Tujuan akhir modernisasi adalah terwujudnya masyarakat modern dengan ciri kompleksitas organisasi, perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Dalam hal ini Schoorl menyebutkan proses pertumbuhan, struktur sosial yang dimulai dari proses perbesaran skala melalui integrasi. Proses ini kemudian berlanjut hingga terbentuknya stratifikasi dan nerarki.

pemerintahannya pun disusun untuk aktivitas secara kolektif dengan aktivitas penting ditampilkan oleh anggota yang berkualitas dalam lingkungan suku. Pemimpin pada pemerintahan primitif biasanya seorang laki-laki yang sudah matang secara usia. Tugas pemerintahan adalah mengambil keputusan, kapan waktu berburu, kapan istirahat, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hukum, dan mengorganisasikan pertahanan ini diberikan secara langsung sehingga mudah dikontrol.

Perkembangan masyarakat tidak memungkinkan bentuk pemerintahan primitif dipertahankan. Pemerintahan moderen tidak dapat memberikan tugas secara langsung, segala sesuatunya harus tertulis dan ada payung hukumnya. Oleh karena itu dalam pemerintahan moderen harus didukung oleh birokrat dan kelembagaan untuk menyelenggarakan kepentingan publik. Penyelenggaraan kepentingan publik ini berhubungan erat dengan politik bahkan pemerintahan dapat berjalan baik bila ada dukungan politik. Pemerintahan dalam hal ini bertugas untuk memproses pembuatan dan penegakan aturan, sedangkan politik merupakan aktivitas rekonsiliasi konflik serta mengumpulkan dukungan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu koalisi dalam suatu pemerintahan dibutuhkan agar terbentuk pemerintahan yang kuat. Pengadministrasian dalam pemerintahan moderen ini harus dilakukan secara tertulis, demikian halnya birokrasi yang berada di dalamnya diatur oleh aturan hukum yang tertulis sebagai aturan formal. Birokrasi menjalankan tugas dengan payung hukum yang jelas dan segala tindakan/keputusan dibuat tertulis. Dominasi pemerintahan sudah tidak ada lagi, yang ada adalah usaha untuk menyatukan unsur pemerintah-pengusaha-masyarakat sebagai mitra untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintah tidak lagi sekedar mengatur dan melayani, tetapi juga memberdayakan dan melibatkan seluruh elemen di dalamnya atau dikenal dengan *good governance*.

Adapun tipe-tipe pemerintahan dikaitkan dengan indikator harapan publik sebagai *reward* atas kinerja pemerintahan dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Citizen Expectation of Government Performance

	DEMO-CRATIC	AUTHOR-ITARIAN	TOTAL-ITARIAN
Durability	+	/	+
Account-ability	+	-	/
Political competition	+	/	-
Adapt-ability	+	-	-
Civil order	+	x	x
Legitimacy	+	/	+
Human rights	+	-	-
Rule of law	+	/	x
Political violence	-	x	/
High: +	Relatively High x	Relatively Low /	Low: -

Sumber: Diadaptasi dari *Handbook of Democracy and Governance Program Indikator s. Washington DC: Center for Democracy and Governance. Melalui pdf. usaid.gov/pdf_docs/PNACC390.pdf. [17/07/2014].*

Pada pemerintahan demokrasi, semua indikator kinerja pemerintah tinggi, kecuali *political violence* rendah. Pada pemerintahan otoriter di mana pemerintahan mengutamakan pengambilan keputusan kepada seorang pemimpin, maka indikator *civil order* dan *political violence* relatif tinggi sedangkan indikator lainnya relatif rendah dan rendah. Pada pemerintahan totalitarian di mana masyarakat segala sesuatunya diatur oleh negara/pemerintah maka *durability* dan *legitimacy* tinggi, sedangkan indikator lainnya relatif rendah dan rendah. Berdasar indikator kinerja pemerintah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tipe demokrasi lah yang paling baik dibanding lainnya. Hal inilah yang kemudian diadopsi hampir semua negara di dunia, bahwa pemerintahan demokrasi lah yang paling baik.

PROYEKSI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan hakikat pemerintahan tersebut, maka aktivitas pemerintahan telan

melahirkan berbagai cabang ilmu pemerintahan, al. etika pemerintahan, kebijakan publik, teori pembuatan keputusan, politik pemerintahan, administrasi pembangunan, kepemimpinan pemerintahan, sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, perbandingan pemerintahan, akuntansi pemerintahan, ekologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, manajemen layanan umum, komunikasi pemerintahan, dll. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada era 1960-an telah mengubah secara mendasar hubungan antar manusia dengan segala konsekuensinya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, menjadikan dunia terasa sempit ibarat *global village*. Peristiwa di belahan bumi lainnya dalam hitungan detik dapat diketahui di tempat lainnya meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh melalui internet. Hal ini secara nyata memengaruhi aktivitas pemerintahan, karena tuntutan layanan masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, tepat, murah, efisien, dan akurat. Perkembangan *cybernetics* tidak dapat ditawar lagi dan mewarnai setiap gerakan-gerakan pemerintahan, sehingga proyeksi ke depan *electronic government (e-Gov)* akan mewarnai dinamika pemerintahan.

Konsep *e-Gov* pada dasarnya adalah *digital government* atau *online government* atau pemerintahan yang dihubungkan dengan interaksi digital. Interaksi digital ini terdiri dari:¹²

“*Governance, Information and Communication Technology (ICT), business process re-engineering (BPR), and e-citizen at all levels of government (city, state/province, national, international)*”.

Ada empat jenis klasifikasi *e-Gov* (Indrajit, 2006: 41), yaitu: *G2C (government and citizens)*, *G2B (government and business/commerce)*, *G2E (government and employees)*, dan *G2G (government and government)*.¹³ Penggunaan teknologi informatika dan komunikasi (ICT) ini mendorong lahirnya pemerintahan yang terbuka (*open government*). Ciri utama *open government* adalah penggunaan

ICT untuk menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan, sehingga terbangun *e-Gov*. Misalnya: *e-budgeting, e-KTP, e-recruitment, e-procurement, e-catalog*, dsb. yang di satu sisi semakin memudahkan masyarakat mendapat layanan secara nyaman, efisien, dan transparan; dan di sisi lain mengurangi kebocoran keuangan negara. Layanan yang diberikan melalui *e-Gov* ini memudahkan masyarakat mendapat layanan tanpa terkendala ruang dan waktu, lebih efisien, transparan serta memudahkan pengawasan. Melalui *e-Gov* ini pula masyarakat dapat diberdayakan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, sehingga aktivitas pemerintahan lebih terkontrol untuk mewujudkan *good governance*. Hubungan yang terjalin antara pemerintah-pengusaha-masyarakat adalah hubungan kemitraan yang sejajar, bukan hubungan subordinasi yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran bersama.

Douglas Holmes (2001) memprediksi berkembangnya *smart communities* akibat adanya ICT ini kemudian akan menciptakan model demokrasi baru yang dinamakan *cyberdemocracy*.¹⁴ Di Indonesia perkembangan *cyberdemocracy* ini sangat terasa pada pilpres di mana tim sukses capres/cawapres menggunakan media sosial (*netcitizen*) untuk melakukan kampanye, memaparkan visi-misi, memengaruhi publik, dsb. Pada era seperti ini, prediksi secara cepat sulit dilakukan mengingat informasi sangat cepat dan cair; sehingga untuk memahaminya maka pemimpin perlu melakukan pendekatan informal atau memasang jejaring untuk menangkap “pesan di balik pesan”. Menjadi tugas penerintah untuk membuat payung hukum dan menegakkan aturan agar orang/kelompok tidak seenaknya

12 Sumber: en.wikipedia.org/wiki/E-Government. [23/07/2014].

13 Indrajit, R.E. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal.41.

14 Holmes, Douglas. 2001. *E-Gov :E-Business Strategies for Government*. London: Nicholas Brealey Publishing. Pada era digital sekarang ini terdapat lima estate (entitas yang mempunyai kekuatan untuk memengaruhi masyarakat luas. Kelima estate tersebut adalah: 1st estate (eksekutif), 2nd estate (yudikatif), 3rd estate (legislatif), 4th estate (*press*), dan 5th estate (*netcitizen* yang melahirkan *cyberdemocracy*). Setiap pemimpin pemerintahan perlu memerhatikan kelima estate tersebut, sebab setiap estate mempunyai kekuatan pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pejabat pemerintah.

sendiri memfitnah orang/kelompok lain melalui media sosial yang dapat mengganggu ketenteraman individu/masyarakat. Ke depan, *cybernetics* dengan berbasis akses internet ini bukan saja memungkinkan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat terluar, terpencil, dan terbelakang asal ada akses internet untuk melakukan pendidikan (terbuka), penyuluhan kesehatan, dll. yang bertujuan semata-mata untuk kemakmuran rakyat bahkan untuk pengembangan *e-voting*, *e-budgeting*, dan layanan lainnya untuk memudahkan pengawasan masyarakat terhadap lembaga publik. Terkait maraknya manipulasi hukum oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi/kelompok, dualisme peran pejabat publik dan ketua partai politik, konflik vertikal ataupun horisontal terkait pilkada, dll. sebagai praktik yang tidak etis dalam penyelenggaraan pemerintahan akan mewarnai perkembangan pemerintahan ke depan. Penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan pengaruh tersebut seringkali tidak dilakukan sendiri tetapi berkelompok dengan memanfaatkan berbagai macam ICT, oleh karena itu ke depan kajian jejaring politik aktor pemerintahan menjadi semakin menarik sebagai bagian pengembangan politik pemerintahan.

Hakikat pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu didukung oleh infrastruktur politik berupa peraturan perundang-undangan yang memadai, antara lain: RUU Etika Penyelenggaraan Negara, UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 39/2009 tentang Kementerian Negara. Kekosongan infrastruktur politik yang mengatur tentang etika penyelenggaraan negara dan administrasi pemerintahan dalam praktiknya melahirkan praktik politik pemerintahan dan pemerintahan yang berpolitik untuk merubah sistem atau aturan yang ada. Kajian etika pemerintahan ke depan akan semakin kaya dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan melalui *policy outputs*, dualisme peran pejabat publik dan ketua parpol, dan konflik horisontal yang digerakkan pejabat publik, konflik antar lembaga pemerintahan (legislatif dan eksekutif), ataupun konflik internal lembaga eksekutif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hakikat pemerintahan adalah aktivitas dalam mengatur/mengelola/mengarahkan, melayani dan memberdayakan semua elemen negara (pemerintah-pengusaha-masyarakat) dengan memanfaatkan sebesar-besarnya *cybernetics* untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Hakikat pemerintahan ini dapat terwujud bila kekuasaan, kewenangan/otoritas, dan pengaruh yang melekat pada pemerintahan digunakan secara baik dan benar disertai kepatuhan dari seluruh elemen di dalamnya untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Kekuasaan, kewenangan/otoritas, dan pengaruh ini hendaknya digunakan dengan menempatkan hukum sebagai panglima, serta berlandaskan etika moral untuk melaksanakan mandat rakyat. Pemerintahan berasal dari masyarakat, oleh karena itu mandat yang diberikan rakyat sebagaimana teori kontrak sosial harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat dalam bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah yang mengikat seluruh komunitas, dipatuhi bersama, dan berpihak pada kepentingan publik. Menjadi hal yang *absurd* bila pemerintahan kurang tanggap terhadap kepentingan publik dan mengutamakan kepentingan individu/kelompok.

Memasuki era moderen ini, hubungan pemerintahan dan rakyat sebagai hubungan subordinasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hubungan pemerintahan dan rakyat adalah hubungan kemitraan yang juga harus menyatu serta memberdayakan unsur lainnya yaitu pengusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemberdayaan seluruh elemen negara ini (pemerintahan-pengusaha-masyarakat) dapat berjalan maksimal pada tipe pemerintahan demokrasi. Hal ini mengingat harapan warga negara pada kinerja pemerintahan yang diukur pada delapan dari sembilan indikator tinggi dibanding pada pemerintahan otoriter dan totaliter.

Perkembangan *cybernetics* dengan mengelaborasi jaringan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memperlancar gerakan-gerakan pemerintah. Penggunaan teknologi informatika dan komunikasi (ICT) ini mendorong lahirnya *e-gov* dan *open government* serta menciptakan model *cyberdemocrat*.

Kasus-kasus praktik pemerintahan di Indonesia terkait tentang jejaring politik aktor pemerintahan akan semakin memperkaya substansi politik pemerintahan, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui *policy outputs*, dualisme peran pejabat publik dan ketua parpol, dan konflik horisontal yang digerakkan pejabat publik, konflik antar lembaga pemerintahan (legislatif dan eksekutif) juga akan semakin memperkaya kajian etika pemerintahan.

Oleh karena itu, pengembangan ke depan cabang ilmu pemerintahan yang terkait dengan topik penelitian tentang e-Gov, jejaring politik aktor pemerintahan, dan etika pemerintahan menjadi kajian yang sangat menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ebenstein, William. 1960. *Great Political Thinkers.: Plato to the Present*. (3rd Ed.). New Jersey: Princeton.
- Guy, James John. 2001. *People, Politics, and Government: A Canadian Perspective*. Ed.5. Canada: Pearson Education.
- Hasan, E. 2011. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Heywood, A. 1999. *Political Theory: An Introduction*. New York: Palgrave.
- Holmes, Douglas. 2001. *E-Gov: E-Business Strategies for Government*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Indrajit, R.E. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pierre, J & Peters, B.Guy. 2000. *Governance, Politics and the State*. London: Macmillan Press Ltd.
- Samawan, I. (1999). *Money Politics, Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Schoorl, J.W. (Terj. RG. Soekadjo). 1982. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Suhelmi, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Darul Falah.
- Toffler, Alvin. 1992. *The Third Waves*. Jakarta: Pantja Simpati.
- E-Government-Wikipedia*, the free encyclopedia. Melalui en.wikipedia.org/wiki/E-Government. [23/07/2014].
- Handbook of Democracy and Governance Program Indikator s*. Washington DC: Center for Democracy and Governance. Melalui pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACC390.pdf. [17/07/2014].
- Pfaltzgraff Jr, Robert L. *Karl Deutsch And The Study Of Political Science*. Melalui www.mmisi.org/pr/02_01/pfaltzgraff.pdf. [10/08/2014].

*) Susanti bekerja di Universitas Terbuka (susanti@ut.ac.id.)